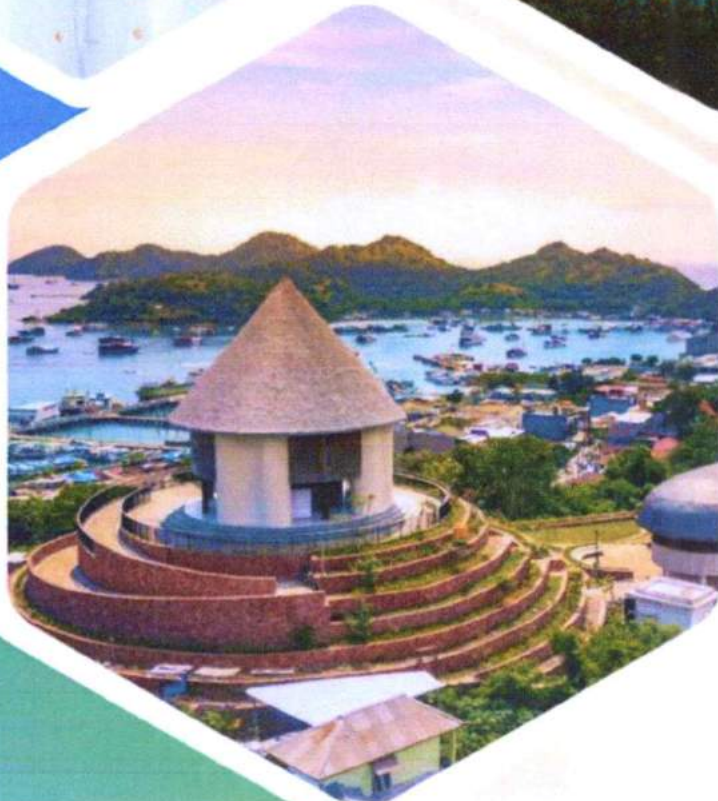
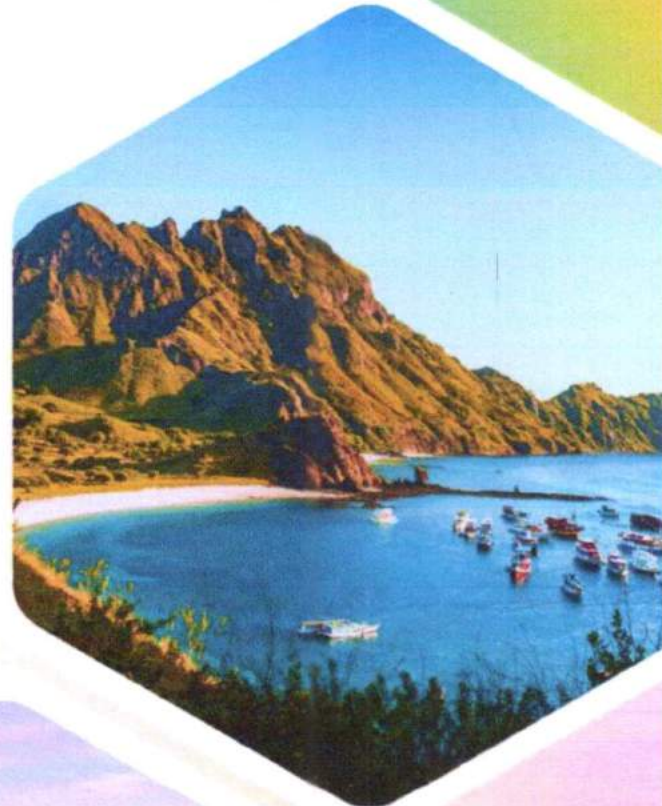




PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Untuk Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kami panjatkan atas segala Berkat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan ini memuat segala informasi transaksi keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, sehingga dapat dipercaya mampu memberikan informasi bagi para pengguna laporan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja oleh Pimpinan serta merupakan salah satu sarana penyampaian pertanggungjawaban yang transparansi dalam pengelolaan keuangan kepada Masyarakat, Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Manggarai Barat



Petrus Antonius Rasvid
Pembina Tk.I
Nip. 19820629 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Organisasi	
Perangkat Daerah	4
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	4
2.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan	5
BAB III Kebijakan Akuntansi	10
3.1 Entitas Pelaporan	11
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	12
BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	13
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	13
4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	25
4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	28
4.4 Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	32
BAB V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	35
5.1 Struktural Organisasi	36
5.2 Tugas Pokok dan Fungsi	36
BAB VI Penutup	37
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang Berbasis Akrual, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA. 2023. Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Dasar Hukum

Pelaporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 dilandasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**, meliputi
- Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan;
 - Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan;
 - Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD**, meliputi
- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
 - Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III : Kebijakan Akuntansi**, meliputi
- Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;

- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan;
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan;
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab IV : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, meliputi

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana;
- Pengungkapan Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab V : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VI : Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja pada BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebesar Rp. 0,- untuk pendapatan dan Rp. 4.913.639.113,- untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp. 2.063.720.513,- untuk belanja Pegawai, untuk Belanja Operasi Rp. 2.687.935.921,- dan Rp. ,- untuk Belanja Modal.

Realisasi target kinerja keuangan BAPPEDA selama tahun 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja pegawai	2.063.720.513	2.047.566.934	(16.153.579)
Belanja Operasi	2.849.918.600	2.687.935.921	(161.982.679)
Belanja Modal	-	-	-
Surplus / (Defisit)	(4.913.639.113)	(4.735.502.855)	178.136.258

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.735.502.855,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.913.639.113,- dengan selisih Bertambah / (Berkurang) sebesar Rp. 178.136.258,- atau 96,37 %,-.

2.2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2023, BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Empat Bidang. Program-program dan kegiatan dalam APBD BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.914.755.613	2.809.295.114	96,38
1	KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.235.200	10.233.500	100
1.1	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.450.000	7.450.000	100
1.2	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.785.200	2.783.500	100
2	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.251.651.513	2.229.488.434	99,02
2.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.944.925.513	1.928.771.934	99,17
2.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	305.465.000	299.465.000	98,04
2.3	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.261.000	1.251.500	99,25
3	KEGIATAN : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.130.000	20.130.000	100
3.1	Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.130.000	20.130.000	100

4	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	-	-	
4.1	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	
5	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	434.738.900	388.843.343	89,44
5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.268.500	1.268.500	100
5.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.785.400	38.825.000	74,97
5.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.450.000	12.450.000	100
5.4	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan	37.580.000	28.349.000	75,44
5.5	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100
5.6	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	69.620.000	69.603.000	99,98
5.7	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	4.600.000	4.599.600	99,99
5.8	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.235.000	212.119.672	90,17
5.9	Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.800.000	4.800.000	100
5.10	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.200.000	15.628.571	96,47
6.	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH		-	
6.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	

7	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.800.000	44.607.600	79,94
7.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000	6.000.000	100
7.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.800.000	38.607.600	77,53
8	KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.200.000	115.992.237	81,57
8.1	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.000.000	55.986.267	72,71
8.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.100.000	54.185.970	91,69
8.2	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	5.820.000	95,41
II	PROGRAM : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.116.579.400	1.107.700.428	99,20
9	KEGIATAN : PENYUSUNAN DAN PENDANAAN	1.029.784.800	1.021.095.902	99
9.1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.787.500	20.784.400	99,16
9.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100
9.3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	28.467.400	28.467.400	100
9.4	Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	24.105.000	24.105.000	100

9.5	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	944.424.900	935.739.102	99,08
10	KEGIATAN : ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	71.724.500	71.709.500	99,84
10.1	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	71.724.500	71.709.500	99,84
11	KEGIATAN : PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.070.100	14.895.026	99
11.1	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.548.600	1.544.500	99,74
11.2	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.521.500	13.350.526	98,74
III	PROGRAM : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	882.304.100	818.507.313	92,77
12	KEGIATAN : KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	186.196.800	164.626.978	88,42
12.1	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12.410.800	12.054.378	97,13
12.2	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.400.000	6.150.000	65,43
12.3	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	133.656.000	118.997.600	89,03

12.4	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.445.000	6.140.000	65,01
12.5	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.285.000	21.285.000	100
13	KEGIATAN : KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	91.264.600	77.530.600	84,95
13.1	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	13.074.000	9.850.000	75,34
13.2	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	980.000	-	-
13.3	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	30.050.000	29.850.000	99,33
13.4	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.465.600	3.025.600	40,53
13.5	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.895.000	5.505.000	79,84
13.6	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	32.800.000	29.300.000	89,33
14	KEGIATAN : KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	604.842.700	576.349.735	95,29

14.1	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	105.973.400	100.807.451	95,13
14.2	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49.404.100	46.539.000	94,20
14.3	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	449.465.200	429.003.284	95,45
14.4	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		-	-

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, atauran-aturan dan praktik-praktik yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BAPPEDA per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut :

3.1. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan –LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan-LO, dan Beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada tahun 2023, BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan berbasis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penerapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat secara ringkas disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0.00	0.00,-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Ijin Prinsip Lokasi (IPL) yang pada tahun 2017 dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum seiring beralihnya urusan Penataan Ruang dari BAPPEDA.

2. Belanja – LRA

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
4.735.502.855,-	6.583.239.294,-

Pada Tahun Anggaran 2023, secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 4.735.502.855,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.913.639.113,- atau 96,37% dari

anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar **0,82 %** berbanding realisasi belanja Tahun Anggaran 2022. Secara rinci, belanja Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	4.913.639.113,-	4.735.502.855,-	96,37
Belanja Pegawai	2.063.720.513,-	2.047.566.934,-	99,21
Belanja Barang dan Jasa	2.849.918.600,-	2.687.935.921,-	94,31
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

3. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 4.913.639.113,- dengan total realisasi sebesar Rp. 4.735.502.855,- atau 96,37 %. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	4.913.639.113,-	4.735.502.855,-	96,37
Belanja Pegawai	2.063.720.513,-	2.047.566.934,-	99,21
Belanja Barang dan Jasa	2.849.918.600,-	2.687.935.921,-	94,31

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.063.720.513,-	2.047.566.934,-	96,37
Belanja Gaji Dan Tunjangan	1.944.925.513	1.928.771.934	99,17
Belanja Gaji Pokok PNS	1.315.230.000	1.301.792.243	98,98
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.872.000	129.819.012	99,20
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.526.000	127.010.000	99,60
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.542.000	45.360.000	99,60
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.376.000	33.045.000	99,01
Belanja Tunjangan Beras PNS	80.934.000	80.313.780	99,23
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	644.000	634.429	98,51
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	23.957	70,07
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	210.773.513	210.773.513	100
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	146.660.000	134.200.000	91,50
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	84.425.000	84.425.000	100

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.020.000	20.020.000	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Penyusunan Program)	7.200.000	7.200.000	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	7.150.000	7.150.000	100,00

Persentase realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar 99,21 % yang didapatkan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.063.720.513,- berbanding besaran realisasi sebesar Rp. 2.047.566.034,-. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut :

1) Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS dianggarkan sebesar Rp. 1.315.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.301.792.243,- atau 98,98%.

2) Belanja Tunjangan Keluarga

Persentase realisasi Belanja Tunjangan Keluarga sebesar 99,20% yang diperoleh dari perbandingan total realisasi sebesar Rp. 130.872.000,- berbanding total anggaran sebesar Rp. 129.819.012,-.

3) Belanja Tunjangan Jabatan

Belanja Tunjangan Jabatan terealisasi sebesar Rp. 127.526.000,- atau 99,60% berbanding total anggaran sebesar Rp. 127.010.000,-

4) Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS terealisasi sebesar Rp. 45.360.000,- atau 99,60% berbanding total anggaran sebesar Rp. 45.542.000,-

5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Belanja Tunjangan Fungsional Umum dianggarkan sebesar Rp. 33.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.045.000,- atau 99,01%.

6) Belanja Tunjangan Beras

Realisasi Belanja Tunjangan Beras pada tahun 2023 sebesar Rp. 80.313.780,- berbanding total anggaran sebesar Rp. 80.934.000,- atau 99,23%,-

7) Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

Persentase Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus pada tahun 2023 sebesar 98,51% yang didapatkan dari perbandingan total realisasi sebesar Rp. 634.429,- terhadap total anggaran sebesar Rp. 644.000,-

8) Belanja Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji dianggarkan sebesar Rp. 28.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.957,- atau 85,56%.

9) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Tambahan Penghasilan PNS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 210.773.513,- dan terealisasi sebesar Rp. 210.773.513,- atau 100%,-

10) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan mencakup Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp. 84.425.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.425.000,- atau 100%.

11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan merupakan honorarium bagi Pejabat Pengelola BMD Perangkat Daerah yang pada tahun 2023 terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp. 20.020.000,-

12) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Penyusunan Program) dibayarkan kepada Pejabat Penyusunan Program yang dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi 100%.

13) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan

Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan dibayarkan kepada Pengelola Kearsipan Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 honorarium ini terealisasi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 4.8000.000,-.

14) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 merupakan honorarium yang dibayarkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2023. Anggaran ini terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp.7.150.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja Bahan Habis Pakai

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.620.000	6.603.000	(17.000)

Belanja Alat Tulis Kantor	47.568.900,-	42.293.900,-	(5.275.000),-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.239.100,-	25.978.800,-	(7.228.100),-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34.239.100,-	24.997.400,-	(9.241.700),-
Belanja Perangkat, Materai, dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.155.200,-	7.081.900,-	(73.300),-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.268.500,-	1.268.500,-	(00),-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.700.000,-	83.640.000,-	(2.860.000),-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.200.000,-	4.200.000,-	0,00

a) Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja ATK dianggarkan sebesar Rp 47.568.900- dan hingga akhir tahun 2023, terealisasi sebesar Rp. 42.293.900,-, atau 88,91 % berbanding total anggaran.

b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 25.978.800,- atau 77,07% berbanding total anggaran sebesar Rp. 33.706.900,-

c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Hingga akhir periode tahun 2023, realisasi anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 24.997.400,- terealisasi sebesar 73% berbanding total anggaran Rp. 34.239.100,- yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.

d) Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya

Belanja Dekorasi dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- dan hingga akhir tahun 2023 terealisasi 100% atau sebesar Rp. 6.000.000,-.

e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer

Persentase Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer terealisasi 98,97% atau sebesar Rp. 7.081.900,- dari anggaran sebesar Rp. 7.155.200,-.

f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

Persentase Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik terealisasi 98,76% atau sebesar Rp. 1.268.500,- dari anggaran Rp. 1.268.500,-.

g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp. 83.640.000,- atau 96,84% dari total anggaran sebesar Rp 90.700.000,-.

h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 9.724.500,- dan hingga akhir tahun 2023 direalisasikan 100 %

i) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu terealisasi sebesar 100% dari total anggaran sebesar Rp. 4.200.000,-.

2) Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja Air	1.800.000,-	1.241.600,-	(558.400),-
Belanja Listrik	48.000.000	37.366.000	(10.634.000)
Belanja Surat			-
Kabar / Majalah	1.200.000	1.200.000	

Belanja			(571.429)
Kawat/Faksimili/ Internet	16.200.000	15.628.571,-	-
Belanja Jasa			-
Pelayanan Kearsipan	4.800.000	4.800.000	
Belanja Jasa	63.000.000		-
Tenaga Kebersihan		63.000.000	
Belanja Jasa			(6.000.000)
Tenaga Administrasi	220.000.000	214.000.000	
Honorarium			-
Penyuluhan atau Pendampingan	117.000.000	117.000.000	
Honorarium Tim	705.310.000		(27.160.000)
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		678.150.000	

Penjelasan terhadap setiap pos Belanja Jasa Kantor sebagai berikut ;

a) Belanja Air

Persentase realisasi Belanja Air sampai pada akhir tahun 2023 mencapai 68,97%, dimana realisasi Belanja Air sebesar Rp. 1.241.600,- berbanding anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.800.000,-. Realisasi Anggaran hanya 68,97 % disebabkan oleh pembayaran tagihan air sesuai pemakaian air selama 1 tahun.

b) Belanja Listrik

Anggaran Belanja Listrik ditetapkan sebesar Rp. 48.000.000,- dimana ruang lingkup kegiatannya mencakup belanja rekening listrik. Realisasi belanja mencapai 77,84% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.366.000,-

c) Belanja Surat Kabar / Majalah

Realisasi Belanja Surat Kabar / Majalah tercatat sebesar Rp.1.200.000,- atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 1.200.000,-. Realisasi Anggaran pada kode rekening sebesar 100%.

d) **Belanja Kawat/Faksimile/Internet**

Belanja Internet dianggarkan sebesar Rp. 16.200.000,- sebagai pendamping layanan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat. Dari total anggaran yang disediakan, sampai akhir tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp15.628.571,- atau 96,47%

e) **Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**

Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan terealisasi 100 % dari total anggaran Rp.4.800.000

f) **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan terealisasi 100% dari totalan anggaran Rp. 63.000.000,-

g) **Belanja Jasa Tenaga Administrasi**

Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan Rp 220.000.000,- berbanding dengan realisasi sebesar Rp. 214.000.000,- atau 97,27 %

h) **Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan terealisasi Rp. 117.000.000,- atau 100 % dari total anggaran Rp. 117.000.000,-

i) **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

anggaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 705.310.000 berasal dari Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 'Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dari total anggaran yang disediakan, terealisasi Rp. 678.150.000,- atau 96,14%

3) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja			
Pemeliharaan	70.000.000	53.934.192	(16.065.808)
Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
Belanja			
Pemeliharaan	52.500.000	52.499.970	(30)
Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua			

Penjelasan lebih detail mengenai Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Pada tahun 2023, persentase penyerapan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan mencapai 77,04% atau Rp.53.934.192,- dari total anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-.

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua dianggarkan sebesar Rp. 52.499.970,- dan sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi belanja Pemeliharaan ini mencapai Rp. 52.499.970,- atau 99,99% dengan sisa anggaran Rp. 30,-.

4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	750.000.000	750.000.000	0

Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik ini bersumber dari dua sub kegiatan yakni Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang melibatkan pihak ke-3 dari Universitas Gajah Mada dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar 100% dan Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) melibatkan pihak ketiga dari Universitas Cendana Kupang dengan anggaran Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar 100%.

5) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor -Alat Pendingin	2.400.000,-	2.400.000,-	0,00,-
Belanja Pemeliharaan Komputer Unit- Personal Computer	1.200.000	1.200.000	0,00,-
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan	2.500.000,-	2.220.000,-	(280.000),-

Komputer
Lainnya

6) Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	409.720.000	376.009.013	(76.114.615)
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	21.600.000	7.200.000	(14.400.000)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.830.000	104.285.000	(17.545.000)

Belanja Perjalanan Dinas terdiri atas :

➤ Perjalanan Dinas Dalam Biasa

Perjalanan Dinas Biasa merupakan perjalanan dinas keluar daerah yang secara total dialokasikan sebesar Rp. 409.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 376.009.013,- atau 91,77%.

➤ Perjalanan Dinas Tetap

Perjalanan Dinas Tetap diperuntukkan bagi fasilitator Stunting Kabupaten yang bekerja dalam Lembaga Bappeda dengan alokasi sebesar 21.600.000,- realisasi anggaran sebesar 7.200.000,- atau 33,33%.

➤ Perjalanan Dinas Dalam Kota

Perjalanan Dinas Dalam Kota mencakup perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 121.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.285.000,- atau 85,59% bersumber dari : Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan total alokasi anggaran sebesar 23.435.000 dan realisasi sebesar 23.360.000 atau sebesar 99,68%, Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan total alokasi anggaran sebesar 21.575.000 dan terealisasi sebesar 100%, Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan total alokasi sebesar 2.865.000 dan terealisasi sebesar 2.850.000,

Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan total pagu anggaran sebesar 2.270.000 dan terealisasi sebesar 2.260.000 atau sebesar 99,56%, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan total alokasi sebesar 3.750.000 dan terealisasi sebesar 3.665.000 atau sebesar 97,73%, Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan total anggaran sebesar 9.400.000 dan terealisasi sebesar 6.150.000 atau sebesar 65,43%, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan total anggaran sebesar 3.390.000 dan terealisasi sebesar 3.150.000 atau 92,92%, Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar 9.445.000 dn terealisasi sebesar 6.140.000 atau 65,01%, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar 11.610.000 dan terealisasi sebesar 8.390.000 atau 72,27%, Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar 6.645.000 dan terealisasi sebesar 2.205.000 atau 33,18%, Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan alokasi anggaran sebesar 6.895.000 dan terealisasi sebesar 5.505.000 atau 79,84%, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar 2.620.000 dan terealisasi sebesar 2.085.000 atau 79,58%, Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar 16.950.000 dan terealisasi sebesar 100%.

4. Belanja Modal

Pada tahun Anggaran 2023 Bappeda tidak menganggarkan belanja modal :

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Manggarai Barat dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan

Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan-LO	0.00,-	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0.00,-	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0.00,-	0.00,-	0.00,-	0.00,-

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang dikelola Bappeda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2023 tetap sama dibanding tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Retribusi Ijin Prinsip Lokasi (IPL) dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum.

2. Beban

Pada Laporan Operasional Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, akumulasi Beban hanya berasal dari Beban Operasi sebesar Rp. 4.563.800.407,- yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 2.040.416.934,-; Beban Persediaan sebesar Rp. 202.063.500,-; Beban Jasa sebesar Rp. 1.136.124.246,-; Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 112.254.162,-; Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 473.994.013,-; dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 598.947.552,-.

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
BEBAN OPERASIONAL	4.563.800.407	6.952.873.883,-	(2.389.073.476),-	152,34%
Beban Pegawai-LO	2.040.416.934,-	2.082.116.235,-	(43.499.301),-	102,13%
Beban Persediaan	202.063.500,-	517.875.500,-	(315.812.000),-	256,29%
Beban Jasa	1.136.124.246,-	2.106.758.204,-	(970.633.958),-	185,43%

Beban Pemeliharaan	112.254.162,-	132.884.870,-	(20.630.708),-	118,37%
Beban Perjalanan Dinas	473.994.013,-	1.534.730.385,-	(1.060.736.372),-	323,78%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	598.947.552,-	578.508.689,-	7.576.380,-	96,23%
SURPLUS / DEFISIT	4.563.800.407,-	6.952.873.883	(2.389.073.476),-	152,34%

Secara lebih terperinci penjelasan mengenai pos-pos Beban Operasional sebagai berikut

a) **Beban Pegawai**

Saldo Beban Pegawai sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 2.040.416.934,- berbanding Rp. 2.082.116.235,- pada tahun 2022 atau mengalami defisit sebesar Rp. 43.499.301,-.

b) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yakni sebesar Rp. 315.812.000,-. Angka ini didapatkan dari selisih antara saldo tahun 2023 sebesar Rp. 202.063.500,- dan saldo tahun 2022 sebesar Rp. 517.875.500,-.

c) **Beban Jasa**

Beban Jasa pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 1.136.124.246,- sementara pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 2.106.758.204,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 970.633.958,-.

d) **Beban Pemeliharaan**

Sampai dengan akhir tahun 2023 saldo Beban Pemeliharaan tercatat sebesar Rp. 112.254.162,- dan turun sebesar Rp. 20.630.708,- dari saldo tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 132.884.870,-.

e) **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Jasa Perjalanan Dinas menurun secara signifikan sebesar Rp. 1.060.736.372,- dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 473.994.013,- sementara pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.534.730.385,-.

f) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Pada tahun 2022, Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tercatat sebesar Rp. 578.508.689,- sedangkan pada tahun 2023 Rp. 598.947.552,-meningkat sebesar Rp. 20.438.863,-

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

1. Aset

1.1. Aset Lancar

ASET LANCAR	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	000
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 pada Bappeda Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami perubahan yakni Rp. 0,00,-.

1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

ASET TETAP	2023(Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Tanah	125.000.000,-	125.000.000,-	0.00,-
Peralatan dan Mesin	650.427.104,-	949.013.191,-	(298.586.087),-
Gedung dan Bangunan	1.671.231.342,-	1.716.739.474,-	(45.508.132),-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	76.666.667,-	96.666.667,-	(20.000.000),-
Aset Tetap Lainnya	3.500.000,-	3.500.000,-	0.00,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Akumulasi Penyusutan	(4.037.238.454),-	(3.673.144.235),-	364.094.219,-
JUMLAH ASET TETAP	2.526.825.113,-	2.890.919.332,-	(364.094.219)-

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat masing-masing Rp. 2.526.825.113,- dan Rp. 2.890.919.332,- dengan rincian jenis Aset Tetap dan Mutasi selama tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini.

1. Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 125.000.000,-.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 650.427.104,- dan Rp. 949.013.191,- atau terjadi penurunan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 298.586.087,-

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.671.231.342,- dan Rp. 1.716.739.474,- atau terjadi penurunan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 45.508.132,-

4. Jalan Irigasi Jaringan

Saldo Aset Jalan Irigasi Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 76.666.667,- dan Rp. 96.666.667,- atau terjadi penurunan aset Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp. 20.000.000,-

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 3.500.000,-, atau tidak mengalami perubahan.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. (4.037.238.454),- dan Rp. (3.673.144.235),- atau mengalami penurunan sebesar Rp. (364.094.219),-.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Nonlancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya yaitu : 1).

Aset Tak Berwujud, 2). Tagihan Penjualan yang Jatuh Tempo lebih dari 12 bulan, 3). Tuntutan Ganti Rugi, 4). Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), dan 5). Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Aset Tidak Berwujud	2.550.440.000,-	1.793.290.000,-	757.150.000,-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(783.273.749),-	(548.420.416),-	(234.853.333),-
Aset Tak Berwujud Neto	1.767.166.251,-	1.244.869.584,-	522.296.667,-
Aset Lain-lain	476.190.199,-	495.788.987,-	(19.598.788),-
JUMLAH ASET LAINNYA	2.243.356.450,-	1.740.658.571,-	502.697.879,-

Penjelasan lebih rinci mengenai Aset Lainnya sebagai berikut :

a) Tuntutan Ganti Rugi

Pada tahun 2023 dan tahun 2022, tidak ada catatan Tuntutan Ganti Rugi Aset.

b) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 757.150.000,-. Aset Tidak Berwujud terdiri atas Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp. (783.273.749) dan Aset Tak Berwujud Neto sebesar Rp. 1.767.166.251,-

c) Aset Lain-lain

Catatan atas Aset Lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp. 476.190.199 dan tahun 2022 sebesar Rp.495.788.987,- mengalami penurunan sebesar Rp. 19.598.788,-.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian

Kewajiban pada BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dan 2020 disajikan di bawah ini:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
KEWAJIBAN			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Utang Bunga	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00,-	0.00,-	0.00,-
Utang Beban	0.00,-	13.500.000,00,-	13.500.000,00,-
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00,-	0.00,-	0.00,-
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00,-	105.050,-	(105.050),-

Pada Tahun 2023 tidak terdapat catatan Saldo jumlah Kewajiban yang wajib dilunasi, sementara pada Tahun 2022 terdapat catatan sebesar Rp. 13.500.000 yang bersumber dari Utang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

3. Ekuitas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022(Rp)
EKUITAS AWAL	4.618.077.903,-	4.987.712.492,-
SURPLUS / DEFISIT-LO	(4.563.800.407),-	(6.624.837.602),-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(19.598.788),-	0.00,-
Koreksi Nilai Persediaan	0,00,-	0,00,-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00,-	(331.528),-
Koreksi ekuitas lainnya	(19.598.788),-	0.00,-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.735.502.855,-	6.583.239.294,-
EKUITAS AKHIR	4.770.181.563,-	4.618.077.903,-

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 4.770.181.563,- dan Rp. 4.618.077.903,-. Terjadi kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp. 152.103.660,- pada tahun 2023.

4.4. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2023, ada 9 sub kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 85% yakni

1. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
6. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
8. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
9. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.785.400	38.825.000	12.960.400	74,97
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.580.000	28.349.000	9.231.000	75,44

3	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.800.000	38.607.600	11.192.400	77,53
4	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.000.000	55.986.267	21.013.733	72,71
5	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.400.000	6.150.000	3.250.000	65,43
6	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.445.000	6.140.000	3.305.000	65,01
7	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	13.074.000	9.850.000	3.224.000	75,34
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.465.600	3.025.600	4.440.000	40,53

9	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.895.000	5.505.000	1.390.000	79,84
---	---	-----------	-----------	-----------	-------

Rendahnya persentase realisasi anggaran pada ke 9 sub kegiatan diatas disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada kas daerah, yang berdampak ada beberapa belanja pada ke 9 sub kegiatan diatas tidak dapat dilaksanakan.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Perangkat Daerah (PD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Manggarai Barat.

5.1. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala BAPPEDA membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Pembangunan Manusia);
3. Bidang Perekonomian dan SDA, yang terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Bidang Perekonomian dan Sub Bidang SDA);
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Bidang Infrastruktur dan Sub Bidang Kewilayahan)
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yang terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Data dan Informasi dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi);

5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 11 tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;
- b) Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- c) Penyelenggaraan analisis data dan informasi pemerintahan daerah;
- d) Penyelenggaraan koordinasi bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) Penyelenggaraan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f) Penyelenggaraan pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjangurusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- g) Penyelenggaraan perumusan dan penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- h) Pengkoordinasian penyelenggaraan MUSREMBANG secara berjenjang;
- i) Pengkoordinasian perencanaan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi pemerintah;
- j) Penetapan dan penyelenggaraan iadministrasi badan
- k) Pembinaan jabatan fungsional
- l) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan pembangunan ; dan
- m) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Dengan Laporan Keuangan ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Bappeda untuk tahun anggaran 2023. Kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Laporan Keuangan Perangkat Daerah ini selain disajikan secara lengkap pada Catatan atas Laporan Keuangan, turut juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda

Kab. Manggarai Barat



Petrus Antonius Rasyid

Pembina Tk.I/ IVB

Nip. 19820629 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LRA SKPD SAP (ANGGARAN)
Per 31 Desember 2023

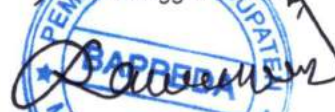
NO. URUT	URAIAN	Anggaran	Realisasi
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	2	40	39
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah		0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00
6	Lain-lain PAD yang sah		0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00
16			
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
18	Dana Penyesuaian	0,00	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
20			
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
25	Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00
26			
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
28	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
31	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
32			
33	BELANJA		
34	BELANJA OPERASI		
35	Belanja Pegawai	2.063.720.513,00	2.047.566.934,00
36	Belanja Barang dan Jasa	2.849.918.600,00	2.687.935.921,00
38	Belanja Bunga		
37	Belanja Hibah		
38	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
39	Jumlah Belanja Operasi	4.913.639.113,00	4.735.502.855,00
40			
41	BELANJA MODAL		
42	Belanja Modal Tanah		
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
47	Jumlah Belanja Modal	0,00	0,00
48			
49	BELANJA TAK TERDUGA		
50	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
52	JUMLAH BELANJA	4.913.639.113,00	4.735.502.855,00
53			
54	TRANSFER		
55	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		

56	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
57	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
59	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	0,00	0,00
55	Belanja Bantuan Keuangan		
56	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
59	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
60	TRANSFER	0,00	0,00
60	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.913.639.113,00	4.735.502.855,00
61			
62	SURPLUS / (DEFISIT)	-4.913.639.113,00	-4.735.502.855,00
63			
64	PEMBIAYAAN		
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
66	Penggunaan SILPA	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
69	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00
70			
71	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
75	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00
76	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00
77			
78	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-4.913.639.113,00	-4.735.502.855,00

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda

Kab. Manggarai Barat



Retrus Antonius Rasvid

Pembina TK/IVB

Nip. 19820629 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LO SKPD SAP
Per 31 Desember 2023

NO. URUT	URAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	2	39
	KEGIATAN OPERASIONAL	
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
6	Lain-lain PAD yang sah - LO	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00
8		
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	0,00
13	Dana Alokasi Umum - LO	0,00
14	Dana Alokasi Khusus - LO	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO	0,00
16		
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	
18	Dana Penyesuaian - LO	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00
20		
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO	
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO	0,00
25	Total Pendapatan Transfer - LO	0,00
26		
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	
28	Pendapatan Hibah - LO	0,00
29	Pendapatan Lainnya - LO	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0,00
31	JUMLAH PENDAPATAN - LO	0,00
32		
33	BEBAN	
34	Beban Pegawai	2.040.416.934,00
35	Beban Persediaan	202.063.500,00
36	Beban Jasa	1.136.124.245,00
37	Beban Pemeliharaan	112.254.162,00
38	Beban Perjalanan Dinas	473.994.013,00
39	Beban Bunga	0,00
40	Beban Hibah	0,00
41	Beban Bantuan Sosial	0,00
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	598.947.552,00
43	Beban Penyisihan Piutang	0,00
44	Beban Transfer	0,00
45	Beban Lain-lain	0,00
46	JUMLAH BEBAN	4.563.800.407,00
47		
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-4.563.800.407,00

49		
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
51	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
52	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
53	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00
54		
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-4.563.800.407,00
56		
57	POS LUAR BIASA	
58	Pendapatan Luar Biasa	0,00
59	Beban Luar Biasa	0,00
60	Pos Luar Biasa	0,00
61	SURPLUS/DEFISIT - LO	-4.563.800.407,00

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda

Kab. Manggarai Barat



Petrus Antonius Rasyid

Rembina Tk.1/ IVB

Nip. 19820629 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LPE SKPD SAP
Per 31 Desember 2023

NO. URUT	URAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	2	41
1	EKUITAS AWAL	4.618.077.903,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-4.563.800.407,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-19.598.788,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	-19.598.788,00
7	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.735.502.855,00
8	EKUITAS AKHIR	4.770.181.563,00

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda
Kab. Manggarai Barat



Petrus Antonius Rasyid
Pembina Tk. I/IVB

Nip. 19820629 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Neraca SKPD SAP (ANGGARAN)
Per 31 Desember 2023

NO. URUT	URAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	2	39
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas di Kas Daerah	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
6	Kas JKN	0,00
7	Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00
8	Kas Lainnya	0,00
9	Piutang Pajak Daerah	0,00
10	Penyisihan Piutang Pajak	0,00
11	Piutang Pajak Neto	0,00
12	Piutang Retribusi Daerah	0,00
13	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
14	Piutang Retribusi Neto	0,00
15	Piutang Lainnya	0,00
16	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
17	Piutang Lainnya Neto	0,00
18	Piutang Transfer	0,00
19	Penyisihan Piutang Transfer	0,00
20	Piutang Transfer Neto	0,00
21	Beban Dibayar Dimuka	0,00
22	Persediaan	0,00
23	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 8) +11 +14+17+20+21+22)	0,00
24		
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	
26	Investasi Nonpermanen	
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00
28	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	0,00
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 25)	0,00
30	Investasi Permanen	
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
32	Jumlah Investasi Permanen (28)	0,00
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)	0,00
34		
35	ASET TETAP	
36	Tanah	125.000.000,00
37	Peralatan dan Mesin	3.066.584.504,00
38	Gedung dan Bangunan	2.275.406.563,00
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.093.572.500,00
40	Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
42	Akumulasi Penyusutan	-4.037.238.454,00
43	Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39)	2.526.825.113,00
44		
45	PROPERTI INVESTASI	
46	Properti Investasi - Tanah	0,00

47	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00
48	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00
49	Jumlah Properti Investasi (33 s/d 39)	0,00
50	ASET LAINNYA	
51	Tuntutan Ganti Rugi	0,00
52	Aset Tak Berwujud	2.550.440.000,00
53	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-783.273.749,00
54	Aset Tak Berwujud Neto	<u>1.767.166.251,00</u>
55	Aset Lain-Lain	476.190.199,00
56	Dana Bergulir	0,00
57	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	0,00
58	Jumlah Aset Lainnya (43+46+47)	2.243.356.450,00
59		
60	JUMLAH ASET (20+30+40+48)	4.770.181.563,00
61		
62	KEWAJIBAN	
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
65	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
67	Utang Beban	0,00
68	Utang Bunga	0,00
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (54 s/d 57)	0,00
71		
72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
73	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61)	0,00
75	JUMLAH KEWAJIBAN (58+62)	0,00
76		
77	EKUITAS	
78	EKUITAS	4.770.181.563,00
79	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (61+64)	4.770.181.563,00

Labuan Bajo, Januari 2024

Kepala Bappeda

Kab. Manggarai Barat



Petrus Antonius Rasyid

Pembina Tk. I/ IVB

Nip. 19820629 200012 1 001